

Parpol Harus Instropeksi Buya Dukung Pemimpin Daerah Independen

JOGJA -- Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad 'Buya' Syafii Maarif mendukung wacana munculnya pemimpin daerah dari jalur independen. Wacana tersebut bisa menjadi pembelajaran dan instropeksi partai politik (Parpol). "Parpol harus instropeksi diri sendiri kenapa rakyat lebih memilih yang independen, bukan dari calon partai," ujar Buya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (17/3).

Menurut Buya, munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Risma dan Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang banyak disukai masyarakat bukan karena partai pendukungnya. Namun karena sosok perorangan yang dinilai mampu membawa perubahan

baik dalam kehidupan masyarakat.

Apa yang dilakukan Ahok yang bersikukuh untuk memilih jalur independen konstitusional untuk menuju kursi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 dinilainya sah-sah saja. Karenanya semua pihak seharusnya tidak perlu memperlmasalahkannya karena sudah sesuai Undang-Undang (UU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Daripada mengurus jalur yang ditempuh Ahok, parpol lebih baik melakukan instropeksi terhadap fungsi yang dimilikinya pada masyarakat. Fenomena tersebut sebagai penanda kalau fungsi parpol sebagai penyalur aspirasi rakyat sudah tidak lagi berjalan dengan semestinya.



DOK HARIANBERNAS

► ke hal 7 Ahmad Syafii Maarif

Buya Dukung

Sambungan dari hal 1

Apalagi saat ini makin marak praktik politik transaksional di parpol. Persoalan itu bisa menjadi bumerang parpol yang berperan sebagai pilar demokrasi di Indonesia. "Politik transaksional jadi penyakit demokrasi kita saat ini," tandasnya.

Buya kembali mengimbau, parpol bisa menjalankan tugas dengan baik. Salah satunya dengan memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya agar mereka dapat menjadi wakil rakyat yang baik. "Pimpinan pusat parpol juga harus lebih banyak memberikan peluang partai di daerah untuk mandiri tanpa banyak dicampuri," tandasnya.

Sementara itu pengamat Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Panji Anugrah Permana mengatakan, keberadaan calon perseorangan bukanlah deparpolisasi (upaya menyingkirkan peran parpol), namun kritik bagi partai politik. "Secara riil tidak terjadi deparpolisasi, ini kritik terhadap keberadaan partai sekarang," katanya di Jakarta, Kamis.

Hal ini menanggapi isu yang berkembang terkait dengan ungkapan deparpolisasi oleh Sekretaris DPD PDIP Prasetio Edi Marsudi tentang majunya Ahok melalui jalur perseorangan.

Ia menegaskan, majunya Ahok melalui calon perseorangan tidak menunjukkan adanya deparpolisasi. Begitu pula dukungan yang diberikan sejumlah masyarakat untuk Ahok maju melalui jalur perseorangan. "Ini karena kemukakan masyarakat terhadap partai politik yang tidak membela masyarakat, tapi kepentingan," tukasnya.

penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat karena publik kesulitan dalam mengakses partai politik.

Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Direktur Utama Survei Lintas Nusantara Emrus Sihombing. Ia mengatakan calon independen bukan berarti sebuah upaya untuk mengerdilkan peran partai politik atau deparpolisasi. "Justru calon independen tersebut sebagai tantangan dan motivasi bagi partai politik untuk berbenah diri sehingga mampu melahirkan pemimpin yang melampaui kualitas calon independen," ujar pengajar Komunikasi Politik di Universitas Pelita Harapan tersebut.

Revisi UU Pilkada

Sedangkan Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya tidak akan memaksakan diri melakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, karena pemerintah telah mengeluarkan pernyataan tidak setuju dilakukan revisi.

"Jadi kalau pemerintah seperti itu (tidak setuju revisi UU Pilkada) DPR pasti tidak akan memaksakan diri maunya DPR," kata Ade di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.

Ade mengatakan dalam pembahasan UU, harus melibatkan dua pihak yaitu pemerintah dan DPR dan apabila salah satu pihak tidak menyetujui, maka pembahasannya tidak bisa berjalan.

Menurut dia, kedua pihak tersebut harus memiliki satu kesamaan dalam menyusun sebuah UU sehingga tidak mungkin hanya satu pihak yang setuju dilakukan pembahasan. "Satu pihak ingin A lalu

tidak ada kesamaan itu maka tidak mungkin terjadi UU apapun itu," ujarnya.

Dia membantah wacana yang berkembang bahwa dorongan revisi tersebut atas dasar untuk menjegal salah satu calon yang akan maju di Pilkada.

Menurut Ade, dalam penyusunan UU tidak boleh mengaitkan kepentingan satu orang, tapi lebih menekankan pada kepentingan publik. "Tidak boleh kita menyusun UU atas dasar hak seseorang, hak tertentu. Kita bicara untuk kepentingan republik ini. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan salah satu orang," katanya.

Revisi UU Pilkada merupakan inisiatif pemerintah dan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi di DPR, ada usulan untuk meningkatkan persyaratan calon independen sebagai azaz kesetaraan.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan tidak mau revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dijadikan ajang untuk memperberat calon yang maju dari jalur independen.

"Jangan sampai perubahan itu (revisi UU Pilkada) dimaksudkan untuk menutup atau menghalang-halangi calon dari independen," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pramono mengatakan pemerintah beranggapan UU tersebut sudah cukup baik sehingga tidak perlu direvisi.

Menurut dia, apabila DPR RI tetap 'ngotot' ingin merevisi dengan salah satu poin revisi memperberat syarat bagi calon yang maju dari jalur independen, eksekutif